

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Latif, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, maka daerah memiliki wewenang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Erawati & Abdulhadi, 2018 laporan keuangan merupakan ikhtisar data organisasi dalam suatu periode akuntansi yang memberikan gambaran keberhasilan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa rincian situasi keuangan dan transaksi organisasi pelapor. Laporan keuangan merupakan kumpulan statistik atau informasi mengenai status keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan juga menjadi kumpulan data atau informasi mengenai posisi keuangan suatu organisasi. Menurut Kieso, 2020 laporan keuangan adalah ringkasan dari aktivitas keuangan suatu entitas yang disajikan secara sistematis, termasuk neraca, laporan laba rugi dan arus kas, yang memberikan informasi relevan kepada

pemakai eksternal. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi.

### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP NO 71 TAHUN 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan tujuan laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan dana seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terkait dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan kredit.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi pelaporan entitas, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau

ekonomi, transfer pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP NO 71 TAHUN 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok terdiri dari:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran berguna untuk menyediakan sebuah informasi untuk memperkirakan sumber daya ekonomi baik yang akan diterima ataupun dikeluarkan dalam mendanai semua kegiatan yang berasal dari pusat maupun dari daerah (Sahroni, 2021). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran berguna untuk menyediakan sebuah informasi untuk memperkirakan sumber daya ekonomi baik yang akan diterima maupun dari daerah. Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja suatu pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup dana yang telah dianggarkan sebelumnya, sehingga LRA berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan dalam suatu periode pelaporan.

## 5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan

perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diperlukan dan lebih diperjelas untuk disajikan dalam standar akuntansi serta ungkapan yang diperlukan untuk disajikan laporan keuangan secara wajar.

#### **2.1.4 Tinjauan Atas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

##### **Keuangan**

Program aplikasi SIMDA Keuangan merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi di pemerintah daerah. Output yang dihasilkan berupa:

1. Penganggaran
  - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
  - b. Rancangan APBD dan Rancangan Penjabaran APBD
  - c. APBD dan penjabaran APBD beserta perubahannya
  - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Penatausahaan
  - a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - c. Surat Perintah Membayar (SPM)
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - e. Surat Tanda Setoran (STS)

- f. Register
  - g. Formulir Pengendalian anggaran lainnya
3. Akuntansi dan Pelaporan
- a. Jurnal
  - b. Buku Besar
  - c. Buku Pembantu
  - d. Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, laporan arus kas dan Neraca)
  - e. Perda pertanggungjawaban dan penjabarannya

#### **2.1.5 Transisi Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan ke Aplikasi SIMDA FMIS**

Kemajuan teknologi informasi dalam sistem keuangan seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah telah menjadi tonggak penting dalam transformasi pemerintahan daerah. SIMDA membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di suatu instansi agar lebih efektif dan efisien. Adanya perkembangan teknologi ini membuat proses pencatatan, pelaporan dan pengawasan anggaran menjadi lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, Simda juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam, memonitor kinerja keuangan secara *real-time* dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Jadi, perkembangan teknologi informasi dalam Simda telah memberikan kontribusi signifikan

dalam meningkatkan tata kelola keuangan di tingkat local, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

SIMDA mulai diimplementasikan pada tahun 2003 sampai saat ini. Diawali dengan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Pemerintah mengembangkan Simda dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Simda Keuangan mulai diimplementasikan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Pada penerapannya SIMDA Keuangan sudah efektif dan efisien. Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan SIMDA yang awalnya berbasis aplikasi sekarang berbasis Web (BPKP, 2021).

## **2.2 *Financial Management Information System (FMIS)***

*Financial Management Information System (FMIS)* merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dibawah ini penjabaran tentang SIMDA FMIS:

### **2.2.1 *Pengertian Financial Management Information System (FMIS)***

FMIS merupakan pengembangan aplikasi SIMDA yang sudah dibangun sejak 2003 dan digunakan secara massif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya seperti SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan dan SAKIP. SIMDA juga sudah digunakan untuk pertukaran data antara

lain dengan pihak perbankan, LKPP, Kementerian Keuangan RI dan BPK RI. Seiring dengan perkembangan, terdapat perubahan regulasi yang memengaruhi aplikasi SIMDA, yaitu PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Anggaran Daerah dan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya perubahan regulasi tersebut SIMDA dituntut untuk melakukan penyesuaian dan perubahan, oleh karena itu BPKP Pusat mengembangkan aplikasi SIMDA FMIS (BPKP, 2021).

SIMDA FMIS merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan. Aplikasi SIMDA FMIS juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis, sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atau transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan (Rahmayanti et al., 2023).

### **2.2.2 Tujuan Pengembangan FMIS**

Sejak tahun 2003 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terus mengalami pengembangan. Tujuan pengembangan program aplikasi SIMDA

FMIS menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah:

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
2. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan.
4. Mempersiapkan aparat daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
5. Memperkuat basis pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah.

### **2.2.3 Output Yang Dihasilkan oleh *Financial Management Information System* (FMIS)**

Dibawah ini adalah output yang dihasilkan oleh SIMDA FMIS (BPKP, 2022) meliputi:

## 1. Penganggaran

### a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

### b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

### c. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersediaan dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

## 2. Penatausahaan

### a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) berkenaan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan SPM.

d. Surat Pengendalian Lainnya.

**2.2.4 Siklus Perencanaan *Financial Management Information Sistem* (FMIS)**

Berikut ini adalah urutan atau siklus Perencanaan SIMDA FMIS menurut Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisi Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pemerintah daerah (Pagu Total merupakan pagu hasil akumulasi dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

- b. Rencana Strategis (Renstra) berisi Sasaran, Program, Kegiatan Sub dan terdapat Pagu Distribusi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- c. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan terdapat Pagu Distribusi dari Rencana Strategis (Renstra).
- d. Rencana Kerja (Renja) berisi program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk 1 tahun untuk Organisasi Pemerintah daerah (OPD) tertentu terdapat Pagu Distribusi dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terdapat Pagu Distribusi dari Rencana Kerja (Renja).
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang berisi rencana belanja sesuai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selama 1 tahun.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Anggraeni, 2023	Transformasi Digital: Memudahkan Proses	Metode analisis deskriptif Kualitatif	Implementasi transformasi digital melalui aplikasi SIKD di

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
		Pemindah bukuan Melalui Aplikasi SIKD Di Kantor Bupati Sleman	dengan teknik interpretasi data, yang hanya menjelaskan fakta-fakta terkait dengan kegiatan yang dilakukan.	Kantor Bupati Sleman telah membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pemindahbukuan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan dan hambatan dalam implementasi perlu diatasi dengan mencari data yang tersedia, meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang ada, serta

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				memberikan pelatihan dan pendidikan untuk pengguna.
2.	Fauzizah, 2023	Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Setelah Penerapan SIMDA Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan suatu permasalahan tekait pembaruan dan pemberlakuan sistem informasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, sehingga menyebabkan ketidak maksimalan penyerapan realisasi anggaran pada Belanja

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				Modal di tahun pertama.
3.	Yahya , 2023	Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah (SP2D) Badan Pengelolaan Anggaran, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi	Metode Deskriptif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pegawai di Bidang Perbendaharaan.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Anggaran, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo masih dilakukan secara manual yaitu dengan mendistribusikan dokumen secara hardfile sehingga kinerja yang

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				dihasilkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKPAD masih kurang efektif dan efisien.
4.	Rahmayanti, 2023	Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS ( <i>Financial Management Information System</i> ) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten	Metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian adalah implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan Keuangan di Dinas Pariwisata Lombok Barat sudah diimplementasikan dengan baik dilihat dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya,

---

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
		Lombok		disposisi atau
		Barat)		sikap, struktur
				birokrasi.

---

---

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian (2024)